

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Sampah merupakan limbah yang dihasilkan dari adanya aktivitas manusia. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang atau material yang gunakan sehari-hari, sehingga pengelolaan sampah tidak terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat. Sampai saat ini permasalahan sampah belum tertangani dengan baik terutama di perkotaan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2008.

Peningkatan produksi sampah telah menimbulkan masalah pada lingkungan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan. Sementara, lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah juga makin terbatas. Kondisi ini makin memburuk manakala pengelolaan sampah di masing-masing daerah masih kurang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan serta tidak terkoordinasi dengan baik.

Sudradjat (2008) menyatakan bahwa permasalahan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya mengena pada berbagai sisi kehidupan terutama di kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, dan Medan. Permasalahan pengelolaan persampahan perkotaan saat ini merupakan akibat dari berbagai perubahan yang cepat, dalam hal tatanan

kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan yang cepat itu mengakibatkan beban TPA sampah menjadi semakin berat. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan mengakibatkan konflik antara TPA dan masyarakat sekitar semakin meruncing. Beberapa kota besar sudah merasakan dampak dari penolakan itu, yaitu Jakarta (kasus TPA Bantar Gebang), Surabaya (TPA Seputih) dan Bandung (TPA Leuwigajah).

Hal ini juga sudah mulai dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar TPA di semua wilayah perkotaan yang terdapat di Provinsi Lampung. Proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan dari sampah padat (*solid waste*), dan sampah yang dihasilkan dari dalam kota atau dari daerah non-kota (*rural*), telah menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan oleh mereka yang terlibat dalam manajemen pengelolaan sampah.

Masalah umum yang dihadapi oleh perkotaan di Indonesia, termasuk perkotaan di Lampung, adalah pembuangan sampah padat dan ketersediaan TPA. Manajemen pengelolaan persampahan harus memberikan alternatif solusi yang terjangkau pembiayaannya, seperti metode manajemen sampah padat yang berkelanjutan (*sustainable solid waste management*) yakni suatu solusi yang lebih efisien, secara teknik tepat, dan secara sosial dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perlu kajian sistem manajemen pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung, terdiri dari 13 kecamatan dengan luas 197,22 km² , jumlah populasi penduduk sebanyak 879.651 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 4.460 jiwa/km².

Berdasarkan standar buangan sampah perkapita 3,25/liter/orang/hari, maka total produksi sampah yang dihasilkan di Kota Bandar Lampung adalah lebih kurang 1.180 ton/hari. Jumlah sampah terangkut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung sekitar 700 m³/hari (560 ton/hari) menggunakan 15 armada truk, dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung dengan menggunakan teknologi *open dumping* sejak tahun 1998, sedangkan sebelumnya menggunakan sistem *sanitary landfill*.

Pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh 4 instansi yaitu : (1) untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan menangani sampah di jalan protokol, sapuan jalan, pertokoan restoran, hotel, industri, perkantoran dan fasilitas umum; (2) untuk sampah di terminal bis antar kota dan dalam kota serta stasiun kereta api dikelola oleh Dinas Perhubungan; (3) sampah di 10 pasar tradisional dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar; (4) sampah di pemukiman di kelola oleh kecamatan melalui Sokli. Sumber sampah di Kota Bandar Lampung berasal dari pemukiman sebesar 16,67%, pasar induk sayuran dan pasar tradisional sebesar 20,34%, sedangkan pertokoan, restoran, hotel, jalan protokol sapuan jalan, kawasan industri, perkantoran, pusat perbelanjaan, terminal dan lainnya sekitar 63,00% (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah timbunan sampah berdasarkan sumber sampah Tahun 2010

No	Sumber sampah	m ³ /hari	%
1	Pemukiman	197	16,66
2	Pasar	240	20,34
3	Pertokoan, Restoran dan Hotel	203	17,20
4	Fasilitas Umum	165	13,98
5	Jalan Protokol, Sapuan Jalan, Perkantoran	145	12,38
6	Industri	187	15,82
7	Terminal dan Stasiun KA	43	3,67
	Jumlah	1.180	100

Sumber: UPT Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, 2010

Penanganan permasalahan sampah pun tidak dapat hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja. Kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat luas menjadi persyaratannya. Pemerintah merupakan penanggungjawab utama dalam pengelolaan dan perumusan kebijakan, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karenanya pemerintah harus memiliki penguasaan atas informasi berkenaan dengan sumber produksi sampah, proses pengelolaan dan bagaimana hasil pengelolaan dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan daerah.

Melihat kecenderungan itu, maka opsi reduksi sampah perlu diketengahkan. Reduksi sampah atau bahkan sampai menyelesaikannya dapat dilakukan dari sumbernya, yaitu pada skala kawasan, ini merupakan implementasi dari prinsip-prinsip 4 R-P yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), *recycle* (mendaur ulang), *replace* (mengganti barang berpotensi sampah ke bahan *recycle*), *participation* (pelibatan masyarakat) dan mengolah sampah untuk dijadikan bahan yang lebih bermanfaat seperti kompos dan briket.

1.2 Identifikasi Masalah

Paradigma baru yang dikembangkan dalam konsep pengelolaan sampah saat ini lebih ditekankan pada pengelolaan sampah pada sumbernya dan harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Hal ini untuk menghindari pencemaran terhadap lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur mengenai cara pengelolaan sampah rumah tangga. Cara pengelolaan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah dengan menerapkan prinsip 3R yaitu meliputi kegiatan pengurangan/pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan

kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Prinsip 3 R harus diterapkan dan menjadi alternatif pemecahan untuk mengurangi permasalahan tingginya timbulan sampah di TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan keterbatasan daya tampung TPA (Tempat Penampungan Akhir). Penanganan permasalahan sampah yang kurang tepat dapat mengancam aspek keindahan kota dan pencemaran lingkungan serta masalah kesehatan. Timbulnya permasalahan sampah saat ini tidak terlepas dari perilaku warga masyarakat sebagai penghasil sampah. Kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak warga masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengupayakan sarana kebersihan yang disediakan diberbagai tempat tetapi banyak yang belum mendapat perhatian dan pemeliharaan dari masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak sampah yang berserakan di luar TPS bahkan sungai-sungai kecil banyak dipenuhi sampah sehingga mencemari lingkungan sekitar baik udara, tanah maupun air. Permasalahan di atas muncul sebagai akibat dari belum dilakukannya pengelolaan sampah sesuai prinsip 3 R di sumber sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Selain itu kurang optimalnya pengelolaan sampah akibat kurang koordinasi antar instansi yang menangani permasalahan sampah

Hal tersebut penting diketahui agar dapat mencari solusi yang tepat guna menurunkan jumlah produksi sampah dan mendapat gambaran tentang pola pengelolaan sampah yang tepat.

1.3 Tujuan

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. untuk mempelajari sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
2. untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung
3. untuk merumuskan suatu strategi dan program yang dapat digunakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah.

1.4 Kerangka Pemikiran

Kondisi persampahan yang ada di Kota Bandar Lampung untuk saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Permasalahan yang ada disebabkan oleh banyak faktor, baik itu dari faktor sistem pengelolaan yang digunakan maupun faktor masyarakat sebagai penghasil sampah yang tersebar. Permasalahan tersebut terlihat dari kondisi sampah baik di TPS maupun di TPA yang tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan sampah terpadu terjadi di Amerika Serikat dengan melalui sosialisasi dan tindakan konkrit yaitu menempatkan unit-unit mobil pengumpul sampah yang dilengkapi dengan alat pemroses. Selain itu, Pemerintah Amerika Serikat

menerapkan sistem insentif baik pada pihak yang menyerahkan sampah maupun pada pengelola sampah (Dinas Pekerjaan Umum, 2006)

Pengelolaan sampah di Rusia juga telah berhasil memanfaatkan 95% sampah dan menjadi bahan yang bermanfaat melalui kombinasi teknologi mekanis, kimia, dan radioisotop. Di Singapura, pengelolaan sampah dilakukan melalui alat pembakaran atau insenerator, hasil pengolahan sampah ini mampu menghasilkan energi dan bahan padatan yang mampu dimanfaatkan kembali (Dinas Pekerjaan Umum, 2006).

Djarmiko (2009) menyatakan bahwa implementasi dari langkah pengolahan (*Reuse* dan *Recycling*) berbasis masyarakat juga terbukti efektif dilakukan di beberapa tempat di Jakarta, Tangerang, dan Surabaya. Di Jakarta, contoh sukses ada di Banjarsari, kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan yang sudah meraih penghargaan dari UNDP. Kota Tangerang juga memiliki kawasan percontohan yaitu di Kompleks Perumahan Mustika Tiga Raksa, sedangkan untuk Kota Surabaya ada di kelurahan Jambangan. Sampah yang mampu diolah sekitar 60%, sehingga sisa yang dibuang ke TPA tinggal 40%. Dengan demikian, usia daya tampung TPA dapat diperpanjang. Namun masih ada sisa-sisa sampah yaitu sekitar 40% yang harus ditampung di TPA. Pada tahap akhir inilah, tanggung jawab pengolahan sampah ada pada pemerintah sepenuhnya karena pada tahap ini diperlukan teknologi canggih.

Pada dasarnya pengelolaan sampah tersebut merupakan suatu peluang usaha, jika dapat memanfaatkan sampah tersebut lebih baik lagi. Untuk itu perlu diubah pola pikir atau paradigma masyarakat yang masih memaknai bahwa sampah adalah sebuah sampah yang harus diperlakukan sebagai sampah.

Menurut Suarna (2008), faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan sampah di antaranya adalah aspek sosial politik, aspek sosial demografi, aspek sosial budaya, keberadaan lahan untuk tempat sampah, *financial* (keuangan), keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan koordinasi antarlembaga yang terkait dalam penanggulangan masalah lingkungan.

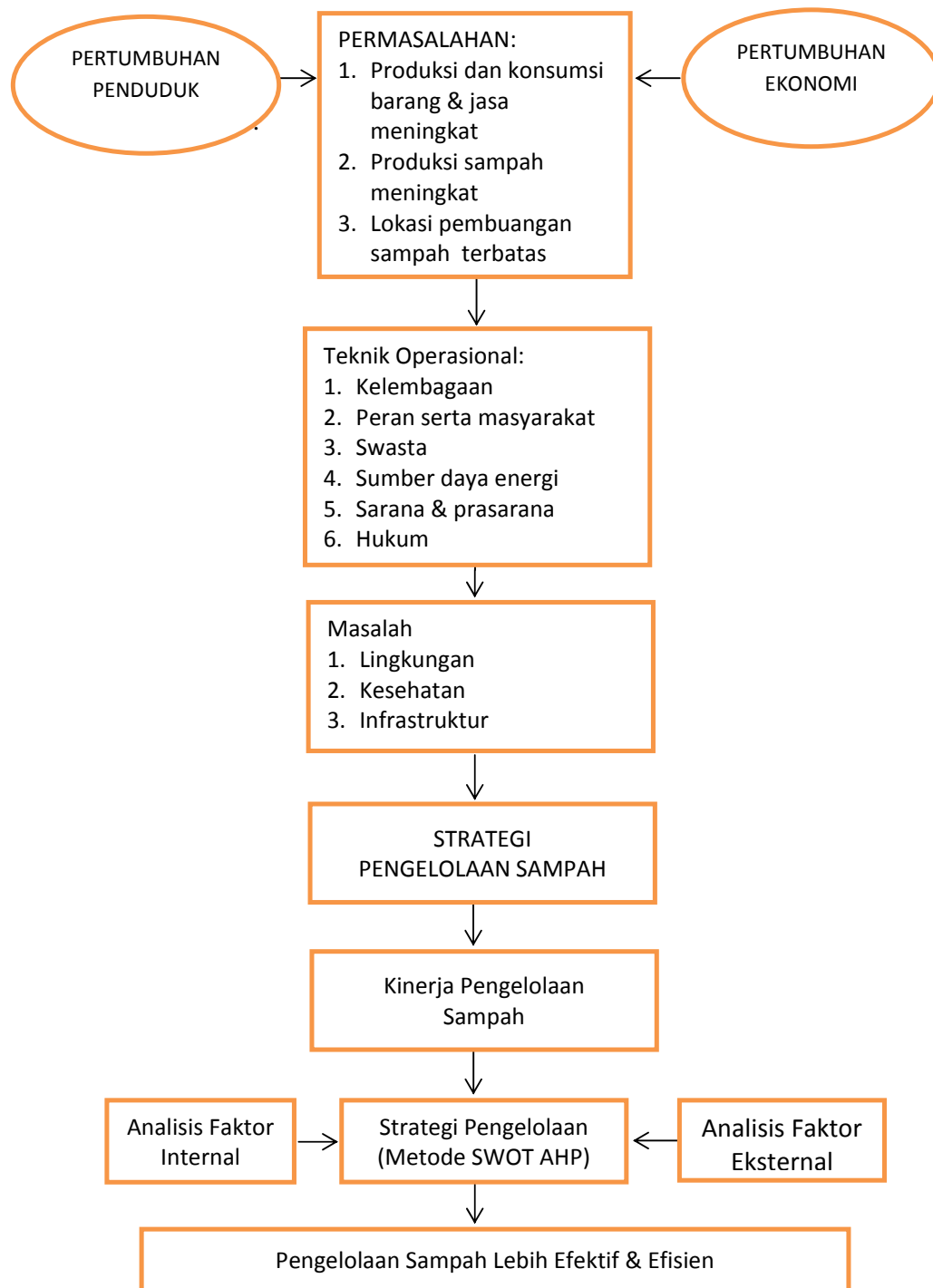
Pada umumnya sampah diartikan sebagai barang buangan hasil aktivitas manusia dalam memanfaatkan alam dan selalu menghasilkan sisa yang dianggap sudah tidak berguna lagi (Widyatmoko dan Sintorini, 2002). Sampah merupakan tanggung jawab pemerintah sedangkan tanggung jawab masyarakat hanya bersifat *incidental*. Hal ini ditegaskan oleh hasil penelitian dari Al Muhdhar (1998) yang menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah, adanya pembayaran retribusi sampah menyebabkan timbulnya persepsi masyarakat bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah oleh masyarakat beralih kepada pemerintah. Penelitian tentang pengelolaan sampah sudah banyak dilakukan (Wiyono, 2002; Djunuryadi, 2003; Bukhori, 2008; Ayunanto, 2008; Kurniawan., 2008.) dengan studi kasus di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian Djunuryadi (2003) menyatakan bahwa masyarakat belum menganggap bahwa pengelolaan sampah perlu penanganan secara khusus. Penanganan pengelolaan sampah cukup ditangani oleh pemerintah atau sekelompok pengurus yang sudah dibentuk di tingkat RW/RT.

Hasil penelitian Bukhori (2008) menunjukkan bahwa partisipasi pengelolaan sampah di kelurahan Bantarsoka Purwokerto dipengaruhi oleh persepsi masyarakat. Beberapa hasil penelitian terdahulu menggambarkan bahwa pengelolaan sampah berbeda pada tiap kasus karena dipengaruhi oleh karakteristik

daerah studi masing-masing penelitian. Penelitian tentang pengelolaan sampah rumah tangga di Bandar Lampung (studi kasus) perlu dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hal tersebut penting diketahui agar dapat dicari strategi yang tepat guna menurunkan jumlah produksi sampah dan mendapat gambaran tentang pola pengelolaan sampah yang tepat.

Dalam penelitian ini digunakan analisis SWOT AHP, yang merupakan gabungan dari Analisis SWOT dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Analisis SWOT dimaksudkan untuk melihat semua faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan mungkin guna penyusunan kebijakan. Sedangkan AHP digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan/program pengembangan pengelolaan sampah di Bandar Lampung yang paling mungkin dan paling menguntungkan.

Metode SWOT AHP adalah gabungan integrasi antara AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dengan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Oppartunities and Threats*) yang dikembangkan untuk perencanaan hutan di Finlandia oleh Kangas dkk. (1996). Penggabungan analisis AHP dalam SWOT ini dikarenakan analisis SWOT terlalu kualitatif. Apabila dikuantifikasikan, tidak jelas berapa bobot antara masing-masing komponen SWOT. Demikian juga bobot antar-faktor dalam komponen tersebut, perlu dibuat prioritasnya, sehingga dalam menentukan strategi mana yang menjadi prioritas akan lebih mudah apabila menggabungkan SWOT dengan AHP. Penentuan faktor-faktor dari setiap komponen SWOT dan pembobotannya diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Kerangka teknis pengelolaan persampahan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka teknis pengelolaan persampahan.